

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	Target Kinerja				Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bidang Pemberdayaan Perempuan																
1	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pembangunan Gender	25%	25%	25%	25%	1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)			Sub Koordinator PUG Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan					
		Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan					1.1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Pemerintah Kewenangan provinsi yang melaksanakan Pengarusutamaan gender (PUG) yang harus ditingkatkan								
							1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	305 orang	110,539,075.00						
							1.2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			Sub Koordinator PUG Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan					
							1.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	255 orang	469,999,784.00						
							1.3. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			Sub Koordinator PUG Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya					
							1.3.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	1685 orang	97,800,000.00						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	Target Kinerja				Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KOMPREHENSIF			Sub Koordinator Perlindungan Perempuan					
							2.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Advokasi Terhadap Para Pihak lingkup provinsi dan lintas kab/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan								
							2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		350 orang	65,050,000.00						
							2.2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dilaksanakan								
							2.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		26 orang	74,596,000.00						
UPTD																
1	Meningkatkan Aksi, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Pelayanan Komprehensif	25%	25%	25%	25%	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban tindak kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif								
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab / Kota	Persentase Pemberian Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		200 orang	279,998,352.00	UPTD					
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan								
							<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		200 orang	254,504,000.00						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	Target Kinerja				Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK																
	Meningkatnya upaya Pemenuhan Hak Anak yang mendapat Pelayanan Komprehensif	- Persentase Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan - Persentase Kab/kota Layak Anak	25%	25%	25%	25%	- Program Pemenuhan hak Anak. - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Sub Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak kewenangan Provinsi melalui Keg. Rapat-rapat KLA <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i> Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.								
									1	Dokumen	83,693,076.00					
									1	Dokumen	81,891,980.00					
							- Program Perlindungan Khusus Anak. - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota. Melalui Keg. Pelatihan PATBM, dan Rapat-Rapat Koord. TPPO	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A PPT/PKT di Rumah Sakit.								
							<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>									
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		11	kabupaten	74,141,828.00					
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		1	Dokumen	109,700,000.00					
	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENATAAN DESA <i>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</i> Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA								
									1	monev	45,012,600.00					
	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA <i>Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i> Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA								
									1	Dokumen orang	89,997,264.00					
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	25%	25%	25%	25%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA <i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
									1	monev kegiatan	50,071,500.00					
									2		244,613,132.00					
									5	kab/kota	69,997,250.00					
	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT <i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
									11	lembaga	125,000,750.00					

